

THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY AND THE IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE-BASED BUDGETING ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE CENTRAL JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT WITH SUPERVISION AS A MODERATING VARIABLE

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PENGAWASAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Wreda Cahya Wardani¹, Sri Isnowati²
Universitas Stikubank Semarang, Indonesia^{1,2}
[wredacahya7048@mhs.unisbank.ac.id¹](mailto:wredacahya7048@mhs.unisbank.ac.id)

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence of accountability, transparency, and performance-based budgeting on regional financial performance. This study aims to analyze the moderating effect of accountability, transparency, and performance-based budgeting on regional financial performance. The population in this study was 200 employees of Regional Apparatus Organizations (OPs) in Central Java Province. The sample in this study was employees of OPs in Central Java Province. Sampling was conducted using a purposive sampling technique with 88 respondents. Data collection used a questionnaire. Data analysis used linear regression analysis. The result of this study that accountability, transparency, and performance-based budgeting have a significant positive effect on financial performance. Oversight does not affect the relationship between accountability and local government financial management performance. Oversight does affect the relationship between transparency and performance-based budgeting and local government financial management performance.

Keywords: *Accountability, Transparency, Performance-based budgeting, Oversight, Financial Performance*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek moderasi akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 200 pegawai Organisasi Aparatur Daerah (OP) di Provinsi Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai OP di Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling purposif dengan 88 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Pengawasan tidak mempengaruhi hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan mempengaruhi hubungan antara transparansi dan anggaran berbasis kinerja dengan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel merupakan syarat penting untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam kerangka desentralisasi fiscal,, penerapan prinsip tersebut jika dilaksanakan juga penerapan anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar

bahwa tata Kelola pemerintahan yang baik berjalan dengan optimal guna mencapai hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan yang baik juga mencerminkan bagaimana efektivitas dan efisiensi dalam mengelola anggaran serta bagaimana suatu daerah mampu untuk mengelola daerah dengan menggunakan sumber daya yang

tersedia. Melalui indikator-indikator kinerja keuangan yang tepat seperti transparansi, akuntabilitas serta pengelolaan anggaran berbasis kinerja, suatu daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam rangka mempertahankan kinerja akuntabilitas, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan kinerja mulai dari proses perencanaan (dalam menentukan tujuan, kinerja, program, kegiatan pembangunan daerah), penganggaran, implementasi serta pertanggungjawaban kinerja keuangan agar relevan selaras dan konsisten. Menurut Edowai, Mikael et al (2021) Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, maka para pengelola anggaran akan lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran sehingga terhindar dari pemborosan dan penyalahgunaan keuangan. Selain akuntabilitas, prinsip transparansi juga merupakan kriteria atau hal penting dalam tercapainya kinerja keuangan yang baik. Transparansi dalam pengelolaan keuangan mengacu pada keterbukaan informasi terkait perencanaan, penggunaan dan pelaporan. Penyediaan informasi yang jelas dan mudah di akses oleh publik serta penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu yang dapat dipertanggungjawabkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sehingga pengelolaan anggaran lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan *Good Governance*, Anggaran Berbasis Kinerja tentunya juga menjadi sebuah jawaban sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah yaitu aspek keuangan berupa ABK (*Anggaran Berbasis Kinerja/ Value for Money*). Menurut Esni, Maria (2019) mengemukakan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil dari keluaran tersebut. Anggaran berbasis kinerja memastikan bahwa sumber daya dialokasikan pada kegiatan yang dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan tujuan yang akan meningkatkan kinerja keuangan dengan menciptakan hasil yang optimal.

Secara empiris, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2024, namun masih terdapat beberapa temuan BPK yang harus dilakukan perbaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikuatkan dengan Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan bahwa walaupun Jawa Tengah telah memperoleh opini WTP, namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti, diantaranya :

- 1) Pendapatan pajak barang jasa tertentu makanan dan/ atau minuman belum sepenuhnya dikenakan
- 2) Wajib pajak belum seluruhnya memberikan akses data dan melaporkan nilai pajak barang jasa tertentu sesuai kondisi nyatanya
- 3) Pendapatan pajak belum disetor

- 4) Permasalahan data objek pajak tidak mutakhir
- 5) Data rekam tapping box belum digunakan sebagai bahan pengawasan/ pemeriksaan wajib Pajak
- 6) Ketidaksesuaian spesifikasi dan kekurangan volume pekerjaan ppada belanja modal
- 7) Pemilihan dan pelaksanaan pengadaan pada belanja e-purchasing tidak sesuai dengan ketentuan
- 8) Realisasi belanja tidak disukung dengan perhitungan yang akurat dan data yang mutakhir sehingga mengakibatkan pemborosan dan kelebihan pembayaran
- 9) Pelaksanaan pegawai belum sesuai dengan ketentuan
- 10) Realisasi BBM tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Sehubungan dengan masih terdapat beberapa permasalahan diatas yang perlu perbaikan, data kinerja keuangan juga menunjukkan beberapa program dan kegiatan yang belum mencapai target atau tren capaian yang menurun, yang mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan tata Kelola yang kurang optimal. Oleh karena itu, temuan BPK menjadi alat ukur penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata Kelola agar realisasi anggaran dapat mendekati atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Berikut data kinerja keuangan berdasarkan target dan realisasi pendapatan daerah.

Tabel 1. Data kinerja keuangan berdasarkan target dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 – 2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2021	26.798.308.421.000	26.633.046.907.175	99,38
2022	24.129.013.356.000	24.168.017.353.579	100,16

2023	26.222.145.305.000	25.369.913.414.883	96,75
------	--------------------	--------------------	-------

Sumber : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan tabel 1. diatas mengenai keuangan berdasarkan target dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 – 2023 kurang maksimal di mana pada dua tahun tidak memenuhi target yaitu tahun 2021 capaian 99,38 % dan tahun 2023 capaian 96,75% hanya di tahun 2022 capaian mencapai 100,16%. Hal tersebut menjadi faktor pendorong Provinsi Jawa Tengah untuk merumuskan berbagai alternatif kebijakan untuk meningkatkan kinerja pegawai serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan beberapa alternatif diantaranya memperhatikan perihal akuntabilitas, transparansi, penerapan anggaran berbasis kinerja serta pengawasan keuangan.

Kesenjangan ini menunjukkan fenomena dengan adanya perbedaan antara capaian formal (Opini WTP) dengan realita atau fakta di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Secara teoretis, Akuntabilitas mendorong penyajian laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, mudah dipahami, sesuai ketentuan dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan sehingga kinerja keuangan dapat berjalan optimal dan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Oktari, Auliza et al (2024) yang mengemukakan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikuatkan juga dengan penelitian Esni, Maria (2019) yang mengemukakan bahwa Akuntabilitas dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kota Malang. Namun hal ini tidak selaras dengan penelitian Afrianto, Dedy et al (2024) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan

antara akuntabilitas dengan kinerja pengelolaan keuangan.

Pada kondisi tersebut tentunya perlu memperhatikan faktor lain yang dapat bekerja secara sinergi untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan sebagai bentuk perbaikan, salah satunya transparansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi menjadi hak masyarakat dan kewajiban pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu dan mudah diakses sehingga dapat memperbaiki dan mempercepat pengambilan keputusan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Karim, Rusdi & Mursalim (2019) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Robinson dan Merchilia (2024) yang menyampaikan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu.

Peraturan pengelolaan keuangan daerah yang efektif lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwasannya menekankan berkaitan dengan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Dengan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja ini diharapkan bahwa alokasi sumber daya pada kegiatan dapat menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan tujuan guna meningkatkan kinerja keuangan agar berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Esni, Maria (2019) yang mengemukakan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Anggaran Berbasis Kinerja ini berkaitan dengan alokasi sumber daya terhadap output dan outcome yang terukur sehingga diperlukan pengawasan

yang efektif untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan terhadap rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlunya meneliti secara komprehensif peran pengawasan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara akuntabilitas, transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa fenomena dan hasil beberapa penelitian terdahulu, tata kelola pemerintahan ini tentunya sangat berpengaruh untuk menjawab tuntutan akan kinerja yang baik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : Menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dan Anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan daerah dan menganalisis pengawasan dalam memoderasi akuntabilitas, dan Anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian Keuangan dari OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 400 orang.

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menentukan kriteria terlebih dahulu (Sugiyono,2011). Penentuan jumlah sampel dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagian yang terlibat dalam proses pengelolaan

keuangan daerah yang terdiri dari OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Subbagian keuangan dengan jumlah responden secara keseluruhan sejumlah 88 responden.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang bersumber dari tangan pertama, data yang diambil menggunakan cara kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang dipakai sebagai pedoman untuk mengadakan tanya jawab dengan responden mengenai akuntabilitas, transparansi, anggaran berbasis kinerja, pengawasan dan kinerja keuangan pada bagian Keuangan dari OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu indikator yang berbentuk kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, uji validitas menggunakan analisis faktor yaitu dengan menguji apakah butir-butir indikator atau kuesioner yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah faktor atau konstruk. Jika masing-masing pertanyaan merupakan indikator pengukur maka memiliki KMO diatas 0,5 dengan tingkat signifikansi 0,05 serta memiliki nilai kriteria *loading* faktor pengujian sebagai berikut (Ghozali, 2016) : *Loading* faktor $>rule\ of\ tumb$ (0,4) berarti valid dan *Loading* faktor $<rule\ of\ tumb$ (0,4) berarti tidak valid.

Uji Reliabilitas

Suatu alat ukur instrumen disebut reliabel, jika alat tersebut dalam mengukur segala sesuatu pada waktu berlainan, menunjukkan hasil yang relatif sama. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan koefisien *Alpha Cronbach* menggunakan SPSS For Windows (Ghozali, 2016) dengan kriteria : Bila nilai $\alpha > 0,7$ maka instrumen reliabel dan Bila nilai $\alpha < 0,7$ maka instrumen tidak reliabel

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan :

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel terdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2016).

2) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti ada hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang independen dari model yang ada. Akibat adanya multikolinearitas ini koefisien regresi tidak tertentu dan kesalahan standarnya tidak terhingga. Hal ini akan menimbulkan bias dalam spesifikasi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan kolerasi antar variabel bebas. Pada

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2016).

Metode untuk menguji adanya multikolinearitas ini dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflantion factor* (VIF). Batas dari *tolerance value* > 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser* yaitu dengan menguji tingkat signifikansinya. Pengujian ini dilakukan untuk merespon variabel x sebagai variabel independen dengan nilai *absolut unstandardized* residual regresi sebagai variabel dependent. Apabila hasil uji di atas level signifikan ($\rho > 0,05$) berarti tidak terjadi heterokedastisitas dan sebaliknya apabila level dibawah signifikan ($\rho < 0,05$) berarti terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2016).

Analisis Regresi Linear dengan Variabel Moderasi

Metode ini dilakukan dengan menambahkan variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderasinya dengan perangkat lunak SPSS versi 22 (Ghozali, 2016). Persamaan regresinya sebagai berikut:
 $Y1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$
 $Y2 = \alpha + \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_3 + \beta_7 Z + \beta_8 X_1.Z + \beta_9 X_2.Z + \beta_{10} X_3.Z + e$

Keterangan:

- Y = Variabel Kinerja Keuangan
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi variabel bebas (Koefisien beta)
- X₁ = Variabel Akuntabilitas
- X₂ = Variabel Transparasi
- X₁ = Variabel Anggaran Berbasis Kinerja
- Z = Variabel Pengawasan
- e = error

Uji Model

Koefisien determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya persentase *goodness of fit* dari variabel independent terhadap *variabel dependent* (Ghozali, 2016).

Uji F

Uji F untuk menguji pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent secara simultan atau bersama-sama (Ghozali, 2016) dengan kriteria taraf signifikan (α) < 0,05.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan uji t dengan model regresi linier berganda yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independent terhadap *variable dependent* dengan menggunakan SPSS (Ghozali, 2016). Adapun kriteria hipotesis diterima bila taraf signifikan (α) < 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu indikator yang berbentuk kuesioner. Adapun pengujian validitas variabel penelitian ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	KMO	Loading Factor	Keterangan
----------	-----	----------------	------------

		Item	Component Matrix ^a	
Akuntabilitas (X1)	0,780	X1.1	0,881	Valid
		X1.2	0,942	Valid
		X1.3	0,769	Valid
		X1.4	0,803	Valid
		X1.5	0,891	Valid
		X1.6	0,808	Valid
		X1.7	0,887	Valid
		X1.8	0,797	Valid
		X1.9	0,428	Valid
		X1.10	0,436	Valid
Transparansi (X2)	0,936	X2.1	0,802	Valid
		X2.2	0,873	Valid
		X2.3	0,902	Valid
		X2.4	0,869	Valid
		X2.5	0,858	Valid
		X2.6	0,963	Valid
		X2.7	0,969	Valid
		X2.8	0,952	Valid
		X2.9	0,980	Valid
Anggaran Berbasis Kinerja (X3)	0,789	X3.1	0,611	Valid
		X3.2	0,981	Valid
		X3.3	0,955	Valid
		X3.4	0,957	Valid
Pengawasan (Z)	0,579	X3.5	0,956	Valid
		Z1.1	0,813	Valid
		Z1.2	0,764	Valid
Kinerja Keuangan (Y)	0,709	Z1.3	0,602	Valid
		Y1.1	0,664	Valid
		Y1.2	0,855	Valid
		Y1.3	0,775	Valid
		Y1.4	0,534	Valid
		Y1.5	0,928	Valid
		Y1.6	0,542	Valid
		Y1.7	0,631	Valid
Y1.8	0,728	Valid		

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2 di atas nilai *KMO and Bartlett's test* semua variabel yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, anggaran berbasis kinerja, pengawasan dan kinerja keuangan sudah memenuhi kriteria kecukupan sampel yang disyaratkan dalam uji validitas, yaitu *KMO* lebih dari 0,5 maka dapat dinyatakan bahwa sampel yang ada sudah mencukupi, sehingga uji faktor dapat dilanjutkan. Sedangkan pada hasil *component matrix*, dapat dilihat bahwa semua indikator dalam variabel akuntabilitas, transparansi, anggaran berbasis kinerja, pengawasan dan kinerja keuangan memiliki *loading factor* yang disyaratkan nilai komponen matriknya lebih besar dari 0,4, sehingga instrumen tersebut valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauhmana data dapat memberikan hasil yang relatif tidak

berbeda bila dilakukan pengukuran kembali pada subyek yang sama atau dapat dikatakan untuk menunjukkan adanya persesuaian antara sesuatu yang diukur dengan jenis alat pengukur yang dipakai. Dalam pengujian reliabilitas ini menggunakan rumus *alpha Cronbach*. Sedangkan untuk reliabilitas, Bila nilai $\alpha > 0,7$ maka instrumen yang digunakan adalah reliabel.

Tabel 3. Pengujian Reliabilitas Variabel-variabel Penelitian

No.	Variabel	Alpha Cronbach	Angka Standar Reliabel	Kriteria
1	Akuntabilitas (X1)	0,929	0,7	Reliabel
2	Transparansi (X2)	0,972	0,7	Reliabel
3	Anggaran Berbasis Kinerja (X3)	0,940	0,7	Reliabel
4	Pengawasan (Z)	0,724	0,7	Reliabel
5	Kinerja Keuangan	0,863	0,7	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Pada uji reliabilitas Tabel 3 di atas variabel variabel akuntabilitas, transparansi, anggaran berbasis kinerja, pengawasan dan kinerja keuangan dikatakan reliabel karena *Alpha Cronbach* $> 0,7$ sehingga dapat disimpulkan variabel penelitian ini reliabel serta kuesioner pada setiap variabel akan mampu untuk digunakan guna memperoleh data yang konsisten..

Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji untuk mengetahui apakah model regresi variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Pengujian Normalitas I Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan One – Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual			
N			88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.56941249
Most Extreme Differences	Extreme Absolute		.83
	Positive		.83
	Negative		-.069
Test Statistic			.083

Asymp.Sig (2-tailed)	.191 ^c
a. Test distribution is Normal	
b. Calculated from data	
c. Lilliefors Significance Correction	

Sumber : Data primer yang diolah, 2025
 Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa uji normalitas hasil penelitian tingkat signifikan variabel penelitian 0,191 > 0,05 maka model regresi terdistribusi normal sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya

Tabel 5. Hasil Pengujian Normalitas II

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan Dimoderasi Pengawasan

		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.94992459
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.051
Test Statistic		.076
Asymp.Sig (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal		
b. Calculated from data		
c. Lilliefors Significance Correction		
d. This is a lower bound of the true significance		

Sumber : Data primer yang diolah, 2025
 Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa uji normalitas II hasil penelitian tingkat signifikan variabel penelitian 0,200 > 0,05 maka model regresi terdistribusi normal sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya

Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *Glejser* sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas I

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.638	.714		.894	.374
Akuntabilitas	.000	.011	.002	.014	.989
Transparansi	.024	.014	.196	1.752	.083
Anggaran Berbasis Kinerja	-.025	.023	-.141	-1.091	.278

a. Dependent Variable: abs

Sumber : Data primer yang diolah, 2025
 Berdasarkan tabel 6 di atas uji heteroskedastisitas tidak terjadi heteroskedastisitas karena tingkat signifikan semua variabel di atas 0,05.

Tabel 7. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas II Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan Di Moderasi Pengawasan

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.078	.769		2.701	.008
Akuntabilitas	.001	.015	.022	.102	.919
Transparansi	-.036	.017	-.368	-2.182	.032
Anggaran Berbasis Kinerja	.084	.036	.601	2.310	.023
Pengawasan	-.190	.101	-.714	-1.880	.064
Interaksi Akuntabilitas - Pengawasan	.003	.003	.325	1.233	.221
Interaksi Transparansi - Pengawasan	.005	.003	.355	1.515	.134
Interaksi Anggaran Berbasis Kinerja - Pengawasan	-.007	.004	-.302	-1.638	.105

a. Dependent Variable: abs2

Sumber : Data primer yang diolah, 2025
 Berdasarkan Tabel 7 di atas uji heteroskedastisitas II hasil penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas karena tingkat signifikan semua interaksi Akuntabilitas – Pengawasan, Interaksi Transparansi – Pengawasan dan Interaksi Anggaran Berbasis Kinerja - Pengawasan di atas 0,05.

Multikolinieritas

Pengujian ini untuk mengetahui adanya hubungan linear yang "sempurna" atau pasti di antara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Tabel 8. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics
-------	-------------------------

	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Akuntabilitas	.682	1.466
Transparansi	.904	1.107
Anggaran Berbasis Kinerja	.675	1.482

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui model regresi yang bebas multikolinieritas karena koefisien regresi antar variabel independen mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10.

Tabel 9.
Hasil Pengujian Multikolinieritas II
Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan Dimoderasi Pengawasan

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics Tolerance VIF
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.		
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	9.685	1.348		7.187	.000		
Akuntabilitas	.034	.025	.057	1.339	.184	.247	4.041
Transparansi	-.056	.029	-.066	-1.916	.059	.386	2.593
Anggaran Berbasis Kinerja	-.253	.064	-.210	-3.963	.000	.162	6.167
Pengawasan	1.463	.177	.637	8.256	.000	.076	3.144
Interaksi Akuntabilitas - Pengawasan	.008	.005	.095	1.774	.080	.158	6.318
Interaksi Transparansi - Pengawasan	.021	.005	.190	4.001	.000	.200	4.999
Interaksi Anggaran Berbasis Kinerja - Pengawasan	.073	.008	.357	9.535	.000	.324	3.089

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui model regresi yang bebas multikolinieritas karena koefisien regresi antar variabel independen mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10.

Suatu uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) dan anggaran berbasis kinerja (X3) terhadap kinerja keuangan (Z) dengan pengawasan (Z) sebagai variable moderasi. Hasil analisis terlihat dalam table berikut :

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 10 Ringkasan Uji Regresi Linier Berganda

No	Hubungan Variabel	Model Regresi Persamaan I					
		Uji Model			Uji Hipotesa		
		Adjusted R Square	F	Sig.	β	T	Sig.
Model 1							
$YI = \alpha + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 + e$							
1	Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan	0,725	77,542	0,000	0,5407,941	0,000	H1 diterima
2	Pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan				0,2113,567	0,001	H2 diterima
3	Pengaruh anggaran berbasis kinerja				0,4126,024	0,000	H3 diterima

		Model Regresi Persamaan II						
No	Hubungan Variabel	Uji Model			Uji Hipotesa			
		<i>Adjusted R Square</i>	F	Sig.	β	T	Sig.	Ket
Model 2								
$Y_2 = \alpha + \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 X_3 + \beta_6 Z + \beta_7 X_1.Z + \beta_8 X_2.Z + \beta_9 X_3.Z + e$								
1	Pengawasan memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan	0,961	303,7450,000	0,095	1,7740,080			H4 ditolak
2	Pengawasan memoderasi pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan					0,1904,0010,000		H5 diterima
3	Pengawasan memoderasi pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan					0,3579,5350,000		H6 diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Persamaan regresi tersebut, diketahui bahwa :

1. Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan menghasilkan persamaan regresi $Y_1 = 0,540 X_1 + 0,211 X_2 + 0,412 X_3$. Berdasarkan persamaan tersebut diatas, disampaikan bahwa :

- Koefisien regresi variable akuntabilitas (X_1) mempunyai nilai sebesar 0,540 dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama (H1): Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dapat diterima.
- Koefisien regresi variable transparansi (X_2) mempunyai nilai sebesar 0,211 dan tingkat signifikan $0,001 < 0,05$ sehingga secara parsial (individu) terdapat

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan regulasi pengadaan. Dengan demikian hipotesis kedua (H2): Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dapat diterima

- Koefisien regresi variable Anggaran Berbasis Kinerja (X_3) mempunyai nilai sebesar 0,412 dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3): Anggaran berbasis keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dapat diterima

2. Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja Terhadap kinerja keuangan dimoderasi pengawasan menghasilkan persamaan regresi $Y_2 = 0,095 X_1.Z + 0,190 X_2.Z + 0,357 X_3.Z$. Berdasarkan persamaan di atas, disampaikan bahwa :

- a. Berdasarkan hasil uji regresi diketahui pengawasan dalam memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan dengan koefisien regresi interaksi akuntabilitas – pengawasan 0,090 dan tingkat signifikan $0,080 > 0,05$ sehingga Pengawasan tidak mampu memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis keempat (H4): Pengawasan mampu mempengaruhi hubungan akuntabilitas dengan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, ditolak
- b. Berdasarkan hasil uji regresi diketahui Pengawasan dalam memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan dengan koefisien regresi interaksi transparansi – pengawasan 0,190 dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga Pengawasan mampu memoderasi hubungan transparansi terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis kelima (H5): Pengawasan mampu mempengaruhi hubungan transparansi dengan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dapat diterima
- c. Berdasarkan hasil uji regresi diketahui Pengawasan dalam memoderasi hubungan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan dengan koefisien regresi interaksi transparansi – pengawasan 0,357 dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga Pengawasan mampu memoderasi hubungan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis keenam (H6): Pengawasan

mampu mempengaruhi hubungan anggaran berbasis kinerja dengan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dapat diterima

Uji Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

1. Koefisien determinasi (R^2) dimana dalam penelitian ini menggunakan Adjusted R Square mengukur seberapa jauh kemampuan variabel akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja dalam menjelaskan variasi variabel kinerja keuangan. Hasil koefisien determinasi diperoleh angka koefisien *Adjusted R Square* sebesar 0,725. Hal ini berarti bahwa sebesar 72,5 % kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja. Sedangkan sisanya $100\% - 72,5\% = 27,5\%$ dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar variabel akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja.
2. Koefisien determinasi (R^2) dimana dalam penelitian ini menggunakan *Adjusted R Square* mengukur seberapa jauh kemampuan variabel interaksi akuntabilitas – pengawasan, interaksi transparansi – pengawasan dan interaksi anggaran berbasis kinerja – pengawasan dalam menjelaskan variasi variabel kinerja keuangan. Hasil koefisien determinasi diperoleh angka koefisien *Adjusted R Square* sebesar 0,961 Hal ini berarti bahwa sebesar 96,1 % kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh interaksi akuntabilitas – pengawasan, interaksi transparansi – pengawasan dan interaksi anggaran berbasis kinerja – pengawasan, sedangkan sisanya $100\% - 96,1\% = 3,9\%$ dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar variabel interaksi akuntabilitas – pengawasan,

interaksi transparansi – pengawasan dan interaksi anggaran berbasis kinerja – pengawasan.

Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji kesesuaian model yang digunakan untuk analisis. Model dinyatakan fit jika nilai sig F lebih kecil dari 0,05.

1. Variabel akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama/simultan terhadap kinerja keuangan. Hasil F hitung 77,542 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ maka akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara simultan atau model persamaan regresi sudah layak.
2. Variabel interaksi akuntabilitas – pengawasan, interaksi transparansi – pengawasan dan interaksi anggaran berbasis kinerja – pengawasan yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama/simultan terhadap kinerja keuangan. Hasil F hitung 303,745 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ maka interaksi akuntabilitas – pengawasan, interaksi transparansi – pengawasan dan interaksi anggaran berbasis kinerja – pengawasan mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan atau model persamaan regresi sudah layak.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja Terhadap kinerja keuangan dimoderasi pengawasan pada instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagian yang terlibat dalam

proses pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis pertama (H1): Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oktari, Auliza et al (2024) yang mengemukakan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikuatkan juga dengan penelitian Esni, Maria (2019) yang mengemukakan bahwa Akuntabilitas dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kota Malang. Menurut penjelasan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut termasuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan hasil uji regresi diketahui hipotesis kedua (H2): Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Karim, Rusdi & Mursalim

(2019) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat transparansi maka hal tersebut diikuti pula dengan kenaikan kinerja keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2006:18) definisi transparansi diartikan sebagai keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dengan adanya ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut berperan sekaligus melakukan fungsi pengawasan sehingga kebijakan yang muncul dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan bagi sekelompok orang yang berkepentingan

Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan hasil uji regresi diketahui hipotesis ketiga (H3): Anggaran berbasis keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Esni, Maria (2019) mengemukakan bahwa Anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Peningkatan kinerja keuangan dapat dilakukan melalui peningkatan tujuan, efektifitas dan efisiensi. Kinerja keuangan dapat meningkat apabila tujuan telah tercapai dan sebaliknya. Anggaran berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan system penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja maka akan

menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Pengawasan dalam memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan hasil uji regresi diketahui hipotesis keempat (H4): Pengawasan mampu mempengaruhi hubungan akuntabilitas dengan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, ditolak. Hal ini berlawanan dengan Penelitian Afrianto, Dedy et al (2024) mengemukakan bahwa pengawasan daerah pada hakikatnya mencakup segala upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan keuangan daerah berjalan efektif sesuai dengan aturan. Jika dilihat dari hasil regresi awal (model 1), akuntabilitas memiliki pengaruh paling kuat diantara variabel lain terhadap kinerja keuangan yang menunjukkan Koefisien Regresi akuntabilitas = 0,540 dengan signifikan pada $p = 0,000$. Hal ini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas sangat dominan dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan sehingga Ketika variabel pengawasan masuk sebagai moderator, perannya tidak menambah pengaruh signifikan atau yang disebut dengan ceiling effect. Ceiling effect dalam penelitian adalah kondisi dimana skor atau nilai responden pada suatu variabel yang sudah mendekati batas maksimum skala pengukuran, sehingga variabel moderasi (dalam hal ini pengawasan) tidak mampu lagi meningkatkan pengaruhnya secara signifikan.

Selain itu, kendala pada indikator pengawasan yang rendah yaitu pada indikator pengawasan yang tepat waktu dan segera dievaluasi, dimana mengindikasikan bahwa meskipun pengawasan ada, kecepatannya tidak cukup untuk memberi efek tambahan pada akuntabilitas yang sudah

tinggi. Dengan adanya pengawasan terhadap keuangan yang kuat, akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan daerah sehingga apabila semua meningkat atau berjalan efektif sesuai dengan ketentuan maka akan berdampak pula pada meningkatnya kinerja keuangan daerah.

Pengawasan dalam memoderasi hubungan transparansi terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan hasil uji regresi diketahui hipotesis kelima (H5): Pengawasan mampu mempengaruhi hubungan transparansi dengan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dapat diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Dedi Afrianto et al (2024) mengemukakan bahwa pengawasan yang efektif oleh APIP mampu mengubah pengaruh yang negative transparansi menjadi positif, sehingga mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Menurut Siagian (1990) mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Mardiasmo (2006:18) definisi transparansi diartikan sebagai keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dengan adanya pengawasan yang kuat terhadap pengelolaan keuangan, akan mendorong keterbukaan dalam memberikan informasi terkait keuangan sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Pengawasan dalam memoderasi hubungan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan hasil uji regresi diketahui hipotesis keenam (H6): Pengawasan mampu mempengaruhi hubungan anggaran berbasis kinerja dengan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dapat diterima. Hal ini sependapat dengan penelitian Esni, Maria (2019) yang mengemukakan bahwa Penerapan berbasis anggaran kinerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan adanya pengawasan yang efektif maka penetapan anggaran berbasis kinerja tepat sesuai dengan sasaran dan tujuan program kegiatan sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan kinerja keuangan. Menurut Siagian (1990) mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Dengan adanya pengawasan yang kuat, akan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga akan berdampak terhadap kinerja keuangan daerah

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh pengawasan pada

instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka kinerja keuangan juga akan meningkat. Demikian pula, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga semakin terbuka pengelolaan informasi keuangan, semakin baik kinerja yang dicapai. Anggaran berbasis kinerja juga menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, yang berarti bahwa semakin efektif penerapan anggaran berbasis kinerja, semakin baik pula hasil kinerja keuangan. Sementara itu, pengawasan tidak memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan kinerja keuangan, namun mampu memoderasi hubungan transparansi dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan.

Dari sisi implikasi teori, temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip penting yang memastikan setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Semakin baik pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada publik, semakin baik pula kinerja keuangannya. Transparansi, yang diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik, juga terbukti penting. Ketersediaan informasi yang memadai memungkinkan masyarakat berperan aktif melakukan pengawasan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih optimal dan dapat mencegah kecurangan atau penyalahgunaan wewenang. Demikian pula, anggaran berbasis kinerja, yang

berorientasi pada output organisasi serta selaras dengan visi, misi, dan rencana strategis, menjadi faktor kunci dalam keberhasilan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Dari sisi implikasi manajerial, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terbesar terhadap kinerja keuangan, sehingga instansi pemerintah perlu mempertahankannya bahkan meningkatkannya, terutama pada indikator terendah menurut responden, yaitu penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu. Transparansi memiliki pengaruh terendah, sehingga perlu ditingkatkan melalui perbaikan pada indikator terendah, yaitu memastikan laporan keuangan bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan pengguna informasi. Selain itu, pengawasan terbukti mampu memoderasi hubungan transparansi dan anggaran berbasis kinerja dengan kinerja keuangan, namun tidak pada akuntabilitas. Oleh karena itu, pengawasan perlu ditingkatkan terutama dalam hal ketepatan waktu, yakni dengan mengevaluasi informasi secepatnya agar dapat segera dilakukan perbaikan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya hanya melibatkan pegawai pada OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas. Selain itu, penelitian ini hanya menguji tiga variabel independen—akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja—dengan variabel moderasi pengawasan, padahal masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja keuangan.

Agenda penelitian mendatang perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, jumlah sampel sebaiknya diperluas hingga mencakup pegawai di luar OPD Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, agar hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi. Kedua, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan, seperti perencanaan anggaran, pengendalian intern, dan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Edowai, Mikael et al. 2024. Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pusaka Almailda : Sulawesi Selatan. 2021.
- Robinson dan Merchilia, 2024, Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu, *Edunomika-Vol 08, No.01, 2024*.
- Afrianto, Dedy et al. 2024. Pengaruh Perencanaan, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Pengawasan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol. 8 No. 3, 2024.
- Esni, Maria. 2019, Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi JRMA*, Volume 7 No.2, Oktober 2019.
- Oktari, Auliza et al, 2024. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi dengan Kompetensi Pegawai sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)* Vol.13 No.03, September 2024.
- Agus Putra Mardika, 2022, Pengaruh Budaya Organisasi Dan Keputusan Pendanaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Koperasi Di Denpasar, *Nusantara Hasana Journal Volume 2 No. 3 (Agustus 2022)*, Page: 375-384
- Chifniyatul Ulya dan Ernawati Budi Astuti, 2018, Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab Tegal, BUMD Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat dan Lurah Kab Tegal), *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13 No.2 2018
- Hari Purwanti, Anik Yulianti, 2022, Pengaruh Akuntabilitas, transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Kediri, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. Vol. 6 No. 3, 2022
- I Gede Agustian Zidan dan Ni Kadek Dewu Padnyawari, 2022, Pengaruh Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, Dan Kompetensi Pada Kinerja Keuangan Di Seluruh Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Denpasar Selatan, *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi April 2022*
- Imam Ghozali, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Lia Suciati, Herlin Tundjung, 2024, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja

- Manajerial Dimoderasi Komitmen Organisasional, *Jurnal Kontemporer Akuntansi Vol.4, No.1, Maret 2024*
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Panuntun, 2016, Pengaruh Pelaksanaan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Tekanan dan Beban Kerja Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan*
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Reski Amalia Purti, 2020, Pengaruh Transparansi dan Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Pada Desa Paomacang), *Jurnal Manajemen Keuangan Universitas Muhammadiyah Palopo*
- Sugiyono 2011, *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan ke-1, Alfabeta, Bandung.
- Theresia Wahyu Retnaningtyas, 2016, Akuntabilitas Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Vicry Raihan Tarima, Jamaluddin MD, 2022, Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran pada pemerintah kota Samarinda, *AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume. 19 Issue 3 (2022) Pages 682-693*